

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI KELURAHAN PASAR II KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana

Strata I (SI) Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Penyiaran



Oleh :

SHERLY WIDYA SYAPUTRI

07031181520018

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2019**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

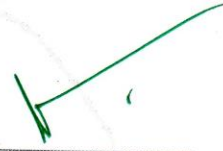
**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DAN
MASYARAKAT MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN PASAR II
KECAMATAN PRABUMULIH UTARA KOTA PRABUMULIH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 19 Desember 2019

Ketua:

1. **Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**
NIP. 197905012002121005



Anggota:

1. **Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si.**
NIP. 199208222018031001



2. **Dra. Martina, M.Si.**
NIP. 196603051993022001

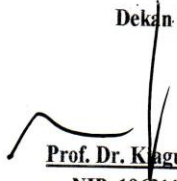


3. **Miftha Pratiwi, S.LKom., M.Si.**
NIP. 197803022002122002



Mengetahui,

Dekan FFSIP



Prof. Dr. Kagus M. Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN PASAR II KECAMATAN PRABUMULIH UTARA KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal :

Palembang, 19 Desember 2019

Pembimbing :

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP.197905012002121005

2. Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si.
NIP. 199208222018031001

Penguji :

1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

2. Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.Si.
NIP. 197803022002122002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sherly Widya Syaputri
NIM : 07031181520018
Tempat dan Tanggal Lahir : Prabumulih, 15 Juli 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi/Penyiaran
Judul Tesis : Strategi Komunikasi Pembangunan
Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di Kelurahan Pasar II Kota
Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Desember 2019
Yang membuat pernyataan,



Sherly Widya Syaputri
Nim.07031181520018

MOTTO

Motto :

- *Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al Insyirah : 5)*
- **Senantiasa belajar, menghargai sesama, berdamai dengan diri sendiri serta merangkul perbedaan.**
- *Maturity is when you do not seek approval from others.*

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orangtua Saya**
- 2. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
- 3. Almamater Saya Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dengan atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pasar II Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tentunya atas dasar bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing I dan Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis, memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ibu Febrimarani Malinda. S.Sos., MA dan Pak Krisna Murti, S.I.Kom, MA selaku dosen penguji proposal penelitian skripsi saya dan yang memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen jurusan Ilmu Komunikasi dan seluruh Dosen Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik yang telah mendidik dan berbagi ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan studi strata satu saya
6. Orang tua saya Ayah Juman MY, dan Ibu tercinta Emi Suarmi, serta Adik perempuanku Regi Dwi Febiani yang selalu mensupport dan

memberikan doa serta semangat, kasih sayang kepada saya dan dukungan moril serta materil yang tak terhingga.

7. Kakak saya Purna Irawan S.Sos., M.Si., yang telah membantu serta membimbing saya dengan sabar dan memberikan banyak sekali kontribusi ide/gagasan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pengalamannya dibangku perkuliahan.
8. Rahmawati Umi K, Feiza Salsabila Deka, Reisita Djambat, teman terdekat selama perkuliahan, teman bimbingan sampai penyelesaian skripsi ini, yang selalu berbagi cerita keluh kesah, berbagi semangat serta dukungan motivasi. Teman-teman M Adhit Satya, Fadhil Priambodo Gio Rambumi, Ridwan, Ris dan Sarah F Hamidah
9. Admin Ilmu Komunikasi Indralaya kami Tercinta Mbak Elvira Humairah dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian sampai penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih yang begitu besar. Semoga apa yang telah dilakukan adalah hal yang terbaik dan hanya Allah yang dapat membalas segala kebaikan dengan balasan terbaik-Nya AAMIIN.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, bagi semua pihak yang membaca dan segenap keluarga besar civitas akademika jurusan Ilmu Komunikasi.

Indralaya, Desember 2019

Penulis,

Sherly Widya Syaputri

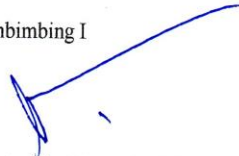
NIM.07031181520018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Penelitian menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Wawancara dilakukan pada informan yang menjadi pelaku dan orang yang mengetahui, memahami dan berperan aktif dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di kelurahan. Hasil penelitian adalah komunikasi pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) telah dilakukan melalui media yang digunakan yaitu media tradisional (oral) dan media modern (*broadcast*), desain instruksional melalui rebug warga interaksi secara langsung, partisipatoris melibatkan warga dan komunitas di masyarakat dan pemasaran baik pelaksanaan musrenbang maupun dokumen hasil musrenbang kepada para pihak di berbagai sektor pemerintahan, dunia usaha/bisnis serta masyarakat. Faktor-faktor menjadi kendala dalam komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, yaitu dominasi kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, persoalan sosio-kultural berupa perbedaan norma sosial dan tingkat pendidikan aktor pembangunan, serta ego sektoral pelaku pembangunan mulai dari institusi pemerintah, swasta hingga entitas sosial masyarakat.

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Pembangunan, Pemerintah Daerah, Masyarakat.

Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Oemar Madri Bafadhal, S.IKom., M.Si
NIP. 19920822201831001

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 19790501200212100

ABSTRACT

This research is to see how the communication strategies of local government and community development in development planning deliberations in Pasar II North Prabumulih, Prabumulih City, South Sumatra. This research uses descriptive qualitative method, as an effort to explore and clarify something about a phenomenon or social reality by describing a number of variables related to the problem and unit under study. Interviews were conducted with informants who were perpetrators as well as people who knew, understood and had an active role in conducting village development planning meetings. The results of this study are development communication between the government and the community in development planning meetings (musrenbang) conducted using traditional media (oral) and modern media (broadcast), learning design through direct discussion of citizen interaction, participatory involving citizens and communities in the community and marketing good implementation of the musrenbang and the results of the musrenbang to parties in various government sectors, the business world / business community. The factors that become obstacles in communication between local government and the community are the dominance of power in influencing government policy, socio-cultural issues in the form of differences in social norms and education levels of development actors, as well as sectoral egos of development actors ranging from government institutions, the private sector to social social entities.

Keywords: Strategy, Development Communication, Local Government, Society.

Advisor I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Advisor II



Oemar Madri Bafadhal, S.IKom., M.Si
NIP. 19920822201831001

*Chairman Of Communication Science Major
Faculty Of Social and Politic Science*



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS.....iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

ABSTRAK.....vii

ABSTRAC.....viii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABEL.....xii

DAFTAR BAGAN.....xiii

DAFTAR GAMBAR.....xiv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 11

1.3.1 Tujuan Umum 11

1.3.2 Tujuan Khusus 11

1.4 Manfaat Penelitian 11

1.4.1 Manfaat Teoritis 11

1.4.2 Manfaat Praktis 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 12

2.2 Kajian Teori..... 17

2.2.1 Konsep Musyawarah Rencana Pembangunan 18

2.2.2 Konsep Pembangunan 19

2.3 Teori Komunikasi Pembangunan.....	29
2.4 Kerangka Teori	29
2.5 Kerangka Pemikiran	33

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.....	37
3.1.1 Lokasi Penelitian	37
3.1.2 Strategi Penelitian	38
3.2 Definisi Konsep.....	39
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Unit Analisis	41
3.5 Informan.....	42
3.5.1 Informan Kunci	42
3.5.2 Informan Pendukung	43
3.6 Sumber Data.....	44
3.6.1 Data Primer.....	44
3.6.2 Data Sekunder	44
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7.1 Wawancara Mendalam.....	45
3.7.2 Pengamatan (Observasi)	46
3.7.3 Dokumentasi.....	47
3.8 Teknik Analisis Data	47
a. Tahap Reduksi Data.....	48
b. Tahap Penyajian Data.....	48
c. Penarikan Kesimpulan	48

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kota Prabumulih	49
4.1.1 Kota Prabumulih	49
4.1.2 Letak Geografis dan Keadaan Alam.....	51
4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Prabumulih	55
4.1.4 Pendidikan.....	55
4.1.5 Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Prabumulih.	57
4.1.6 Jumlah Pemeluk Agama.....	57

4.1.7 Topografi	58
4.1.8 Jarak Tempuh.....	59
4.1.9 Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	59
4.2 Kelurahan Pasar II Kota Prabumulih	61
4.2.1 Luas Wilayah	61
4.2.2 Jarak dari Pusat Pemerintahan.....	63
4.2.3 Kondisi Geografi	63

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Strategi Media Yang Digunakan	65
5.1.1 Komunikasi Melalui Media Audio	66
5.1.2 Komunikasi Melalui Media Visual	68
5.2 Strategi Desain Instruksional	73
5.2.1 Komunikasi Metode Informatif	74
5.2.2 Komunikasi Metode Persuasif	76
5.2.3 Metode Komunikasi Edukatif	78
5.3 Strategi Partisipatori	81
5.3.1 Komunikasi Partisipatori Antar Individu	82
5.3.2 Komunikasi Partisipatori Antar Institusi.....	84
5.4 Strategi Pemasaran Yang Digunakan	87
5.4.1 Komunikasi Pemasaran Secara Langsung	88
5.4.2 Komunikasi Pemasaran Secara Tidak Langsung	100
5.5 Kendala Dalam Komunikasi Musrenbang.....	106

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan	112
6.2 Saran	112
6.2.1 Teoritis	113
6.2.2 Praktis	113

DAFTAR PUSTAKA114

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan dari Hasil Usulan RT/RW	9
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Tabel Usulan Kegiatan Prioritas melalui Masyarakat	23
2.3 Tabel Sektor yang mengusulkan usulan masyarakat	26
3.1 Tabel Rincian Variabel Penelitian.....	40
3.2 Tabel Informan Kunci	43
3.3 Tabel Informan Pendukung	44
4.1 Tabel Batas Wilayah Prabumulih	52
4.2 Tabel Daftar Lurah dan Kepala desa	53
4.3 Tabel Komposisi Jumlah Penduduk	54
4.4 Tabel Pendidikan Warga	55
4.5 Tabel Jumlah Gedung Sekolah	56
4.6 Tabel Jenis Pekerjaan Penduduk	57
4.7 Tabel Jumlah Penduduk Pemeluk Agama	58
4.8 Tabel Jumlah Gedung Sekolah	62
5.2 Tabel Sinergi Pilar Pemangku Kepentingan	89
5.3 Tabel Usulan Masyarakat tentang Kegiatan Prioritas Kelurahan .	93
5.4 Tabel Daftar Urutan Kegiatan Infrastruktur	96
5.5 Tabel Realisasi Penggunaan Dana	99
5.6 Tabel Rekap Alokasi Anggaran	101

DAFTAR BAGAN

2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	36
4.1 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Pasar II	60

DAFTAR GAMBAR

5.1 Gambar Surat Sebagai Media Visual	71
5.2 Gambar Papan Informasi sebagai Media Visual	71
5.3 Gambar Meninjau Rencana kegiatan bersama Warga.....	75
5.4 Gambar Sosialisasi Usulan Musrenbang di Rumah Warga	78
5.5 Gambar Rembug Warga	80
5.6 Gambar Komunikasi Partisipatori Individu	86
5.7 Gambar Komunikasi Partisipatori Institusi.....	88
5.8 Gambar Kegiatan Pemasaran	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di berbagai bidang pesat dilaksanakan mulai dari perkotaan hingga ketingkat pedesaan. Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) serta dana dari swasta dikucurkan kepada pemerintah daerah atau ke kelompok-kelompok masyarakat didaerah untuk menunjang keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Demi keberhasilan pembangunan tersebut maka peran serta masyarakat dan berbagai sektor dalam menentukan arah pembangunan sangat penting agar tujuan dari pembangunan tersebut bisa mencapai sasaran, yaitu bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah daerah berperan dalam melakukan komunikasi pembangunan dengan berbagai pihak baik sektor swasta maupun masyarakat agar dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam melakukan percepatan pembangunan dengan menggunakan berbagai dana dan sumber pembiayaan yang sesuai dengan undang-undang.

Di Kota Prabumulih, sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 45 Tahun 2016, organisasi yang berfungsi menjalankan fungsi pembangunan tidak hanya walikota tetapi camat, lurah hingga organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan yang sifatnya relawan. Organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) yang berada di kelurahan dan berfungsi sebagai pihak yang mengkomunikasikan peran Bappeda sebagai perencana pembangunan tingkat kota dengan masyarakat harus menjalankan perannya secara optimal agar proses penyusunan rencana pembangunan melalui proses musrenbang dapat berjalan dengan baik. Di tingkat kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT sebagai unsur pemerintah di tingkat kelurahan mempunyai peran penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan.

Aktor-aktor pembangunan yang terdapat di dalam organisasi LPMK itu sendiri mempunyai peran masing-masing tergatung seksi yang berada dalam

strukturnya, meliputi seksi keagamaan, kantibmas, pembangunan dan ekonomi, kesejahteraan rakyat, kesehatan, pemuda dan olahraga, serta peningkatan peranan wanita (Ketua LPMK Kelurahan Pasar II, 2019).

Keterlibatan semua pihak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi kegiatan sangat penting. Hal ini agar semua pihak dapat berpartisipasi dengan baik dan mendukung setiap tahapan kegiatan. Peran lurah sebagai pemerintah di kelurahan yang mengkoordinir semua organisasi di kelurahan diperlukan agar dapat melaksanakan kegiatan musrenbang yang partisipatif.

Komunikasi dikatakan efektif apabila menimbulkan efek yang diharapkan dari komunikasi. Hal tersebut bisa terjadi bila komunikator mengenal secara benar siapa komunikannya. Karena salah satu prinsip utama dari komunikasi ialah bahwa komunikasi hanya bisa terjadi bila terjadi pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi (Cangara, 2014: 23).

Menurut Mas'ood (dalam Warjio, 2016:99-100), pembangunan merupakan sebuah proses politik yang menghadirkan banyak aktor dan satu sama lain saling memengaruhi untuk menguatkan posisi mereka dalam persaingan kepentingan mereka. Aktor politik pembangunan berfungsi sebagai penghubung antar dua sistem sosial yaitu menghubungkan antara yang memelopori perubahan dan sistem sosial yang menjadi klien dalam perubahan tersebut (Roger dan Shoemaker dalam Warjio, 2016:213-214). Aktor pembangunan terdiri dari Negara (pemerintah), swasta, masyarakat sipil, serta individu (Warjio, 2016:216).

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan, pelaksanaannya perlu melibatkan semua pihak agar lebih bersinergi dan terintegrasi dengan mengoptimalkan kemampuan kerjasama, kolaborasi, jaringan, dan memaksimalkan potensi lokal yang ada pada masyarakat melalui komunikasi pembangunan yang baik. Kerjasama yang terintegrasi dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan bagi masyarakat merupakan upaya penting yang bertumpuh pada koordinasi yang efektif antara pemerintah, perusahaan (dunia usaha/pelaku bisnis), serta masyarakat.

Menurut (Scramm dalam Nasution, 2004:101), merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam pembangunan, yaitu:

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan agar mereka memusatkan perhatian kepada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi masyarakat.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.
3. Mendidik tenaga kerja dari seluruh lapisan masyarakat yang diperlukan dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat agar sinergisitas dalam pembangunan dapat terjadi. Informasi terutama berkaitan dengan upaya penyusunan rencana pembangunan harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan dan dapat menjadi kontrol pada implementasinya.

Sebagaimana pembangunan menurut Roger (dalam Nasution, 2004:82-83), pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan (termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan dan kualitas yang dinilai tinggi lainnya) bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya.

Dalam pembangunan, komunikasi itu sangat penting dan termasuk berkaitan dengan pilihan komunikasi yang akan dipergunakan berkaitan dengan kondisi sosial budaya di masyarakat. Menurut Lerner (dalam Nasution, 2004:109-110), sistem komunikasi merupakan indikasi sekaligus agen dari proses perubahan sosial. Perubahan sistem komunikasi masyarakat selalu berjalan satu arah yaitu dari sistem komunikasi oral (mulut ke mulut) ke sistem komunikasi modern (yang menggunakan media). Sistem komunikasi oral, cocok untuk masyarakat tradisional, sedangkan sistem komunikasi media sesuai untuk masyarakat modern.

Dalam pelaksanaan musrenbang, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) harus memperhatikan sistem komunikasi dan strategi yang digunakan karena melibatkan masyarakat yang mempunyai stratifikasi, pendidikan dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting untuk menunjang proses pembangunan.

Peranan komunikasi dalam pembangunan (Scramm dalam Nasution, 2004:102-103), yaitu:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan melalui internalisasi nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi
2. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
3. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung bersama-sama.

Musyawarah rencana pembangunan melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah daerah, camat, lurah, ketua RW, tokoh masyarakat hingga masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat memudahkan perencanaan dan implementasi program dari pihak yang potensial baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Komunikasi pembangunan melalui musyawarah di tingkat kelurahan juga dilakukan di Kelurahan Pasar II Prabumulih, terlebih sejak tahun 2004 melalui undang-undang otonomi daerah telah menjalankan fungsi otonom yaitu mendapat tugas dari pemerintah pusat untuk menjalankan peran dan fungsi secara mandiri dengan sedikit intervensi dari pemerintah pusat.

Prabumulih sebelumnya adalah kota administratif yang merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Muara Enim. Sejak tahun 2001 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, maka statusnya resmi menjadi sebuah kota yang secara administratif memiliki aparat pemerintahan dan lembaga legislatif yang berdiri sendiri, terpisah dari Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.

Sebagai daerah otonom yang baru dibentuk, Kota Prabumulih nampak mulai melakukan pembangunan baik fisik maupun non fisik, antara lain

memperluas jalan protokol, membangun jalan arteri sepanjang 28,5 km serta akan menyediakan berbagai sarana pelayanan publik yang tentunya mendorong investor dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan (data Prabumulih Dalam Angka, 2018).

Kota Prabumulih terdiri dari 37 desa/kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan. Salah satu kelurahan adalah Pasar II Kota Prabumulih yang secara administratif terletak di pusat kota yang mempunyai kompleksitas permasalahan termasuk masalah pembangunan. Kelurahan Pasar II Prabumulih terdiri dari 24 RT dan 5 RW. Di Kelurahan ini terdapat 1.422 unit rumah permanen, 30 unit rumah semi permanen, 13 unit rumah panggung kayu dan 45 unit ruko (*Data Kelurahan Pasar II, 2018*). Jumlah penduduk Kota Prabumulih pada tahun 2018 sebesar 182.128 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 91.827 jiwa dan 90.301 perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 419 jiwa persegi (data Prabumulih Dalam Angka, 2018). Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Pasar II Prabumulih 6.853 jiwa dengan rincian 3.370 jiwa laki-laki dan 3.083 jiwa perempuan serta kepala keluarga sebanyak 1.676 jiwa. Di Kelurahan Pasar II Prabumulih masyarakat yang bekerja sebagai PNS sebanyak 1.237 jiwa, pekerja swasta 2.121 jiwa, pedagang 3.047 jiwa dan pekerjaan lainnya sebanyak 448 jiwa (*Data Kelurahan Pasar II, 2018*).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan perlu mendapatkan perhatian yang optimal. Subjek pembangunan adalah unsur manusia, maka hasil dari pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian maka peranan manusia dalam posisi yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan.

Optimalisasi mutu sumber daya manusia aparatur dirasakan sangat penting dalam mencapai keberhasilan yang menjadi cita-cita pembangunan. Betapapun sempurnanya aspek ilmu dan teknologi serta ekonomi tanpa aspek manusia, sulit mencapai pembangunan. Masyarakat Prabumulih merupakan pelaku pembangunan untuk melaksanakan pelayanan publik. Sebagai kota administratif yang mempunyai otonom dari pemerintah pusat untuk menjalankan sebagian besar dari pemerintahan. Sebagai daerah otonom yang baru dibentuk, Kota

Prabumulih nampak mulai melakukan pembangunan baik fisik, antara lain memperluas jalan protokol, membangun jalan kota serta non fisik dengan menyediakan berbagai sarana pelayanan publik yang tentunya mendorong investor dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan. Prabumulih sebagai salah satu kota administratif di Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya mempunyai berbagai instansi pelayanan publik yang tentunya membutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pada Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dalam Pasal 1 Ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musyawarah perencanaan pembangunan diawali dari tingkat kelurahan dan desa. Data dan masukan mengenai persoalan kelurahan dan desa dijadikan sebagai masukan untuk rencana pembangunan dan data tersebut akan dibahas di musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Rencana kerja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah pemerintah kecamatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kecamatan

bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berdiskusi dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Rencana kerja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam perencanaan pembangunan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan masalah interaksi antar instansi pemerintah tidak terkecuali kelurahan. Hal ini perlu karena jangan sampai instansi-instansi hanya pemerintah hanya ingin bertanggung jawab dengan program-program dalam perencanaannya sendiri dan kurang merespons program bersama yakni bagi instansi sendiri dan instansi lainnya (Usman, 2012).

Implementasi kegiatan musrenbang melalui peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) itu sangat penting untuk memastikan usulan-usulan prioritas yang didapatkan di RT-RT di kelurahan sehingga dapat bersinergi dengan program-program yang berpotensi diakomodir oleh instansi atau dinas di tingkat kota. Untuk itu perlu partisipasi masyarakat agar semakin banyak daftar usulan yang dapat di bahas bersama *stakeholders* terkait pada musrenbang tingkat kota nantinya.

Pada Tahun 2019, Kelurahan Pasar II melaksanakan musrenbang pada bulan Januari dengan agenda membahas kembali rencana pembangunan Kelurahan Pasar II pada tahun sebelumnya yang belum terealisasi, penambahan rencana baru kegiatan pembangunan pada Tahun 2019 serta pembangunan yang diprioritaskan. Dari hasil musyawarah, rencana pembangunan mengacu pada usulan yang prioritas menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak khususnya perbaikan jalan dan drainase namun usulan kegiatan lainnya masih tetap diakomodasi (MH. Muhajirin, Ketua LPMK, 2019).

Berikut daftar urutan kegiatan prioritas Kelurahan Pasar II Tahun 2019 hasil musrenbang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan Dari Hasil Usulan RT/RW

No	Prioritas Daerah	Sasaran Kegiatan		Volume	Rencana Pagu Anggaran	SKPD Penanggung Jawab
		Prioritas	Lokasi			
1	Kel. Pasar II	Drainase	RT01/02, RT01/04, RT06/04, RT05/04	300 M	Rp. 250.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
2	Kel. Pasar II	Jalan	RT01/04, RT06/04	400 M	Rp. 200.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
3	Kel. Pasar II	Drainase dan Saluran Air	RT01/04, RT02/04, RT05/04, RT06/04	440 M	Rp. 70.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
4	Kel. Pasar II	Drainase dan Saluran Air	RT01/04, RT02/04, RT04/04, RT05/04	595 M	Rp. 95.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
5	Kel. Pasar II	Drainase dan Saluran Air	RT03/02, RT04/02, RT01/03	800 M	Rp. 120.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
6	Kel. Pasar II	Pengecoran Bahu Jalan	RT01/02, RT05/04	200 M	Rp. 30.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
7	Kel. Pasar II	Drainase dan Saluran Air	RT01/01, RT02/01	600 M	Rp. 99.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
8	Kel. Pasar II	Perbaikan Gorong-Gorong	RT06/01	1 Buah	Rp.200.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
9	Kel. Pasar II	Pembuatan Pagar PUSTU	RT03/02	75 M	Rp. 27.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman
10	Kel. Pasar II	Drainase dan Saluran Air	RT01/02, RT02/03	1.070 M	Rp. 171.000.000;	Dinas perumahan dan permukiman

Sumber: *Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kelurahan Pasar II, 2019.*

Daftar kegiatan prioritas hasil kesepakatan musrenbang akan dijadikan sebagai bahan musrenbang tingkat kecamatan dan pada akhirnya nanti akan dijadikan sebagai materi dalam penyusunan rancangan RKPD Kota Prabumulih Tahun 2019. Musrawarah ini melibatkan semua kelompok-kelompok diskusi yang terdiri dari unsur pemerintah kelurahan, Ketua LPMK, Kasi Ekobang, Ketua RW dan unsur masyarakat untuk memastikan partisipasi semua pihak dalam melakukan komunikasi pembangunan pada penyusunan dokumen musrenbang.

Rencana pembangunan yang dibahas dalam musrenbang diproyeksikan untuk mengakses APBD kota yang telah dianggarkan oleh pemerintah kota. Untuk itu, mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kota itu sangat penting agar antara rencana kelurahan dan rencana prioritas kota dapat selaras. Namun dalam proses musrenbang, usulan prioritas kelurahan harus diperjuangkan karena sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan masing-masing. Pelaksanaan musrenbang yang melibatkan berbagai pihak sebagai aktor dalam setiap tahapan proses pembangunan masih belum banyak dilakukan penelitian terutama berkaitan dengan strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, karena itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pasar II Kota Prabumulih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai untuk mengetahui dan menganalisis strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan akademisi serta dapat digunakan dalam menambah literatur ilmu-ilmu komunikasi khususnya komunikasi pembangunan dalam memahami berbagai fenomena yang berkaitan dengan strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai bahan rujukan bagi studi lanjutan dalam mengungkap aspek yang berkaitan dengan strategi komunikasi pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan pihak kelurahan dan kecamatan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk menentukan tujuan dan arah pembangunan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community Deploymen Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aris, Rosita. 2017. *Komitmen Bappeda Pada Kegiatan Musrenbang RKPD Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Skpd Pada Program Rpjmd Di Kabupaten Ciamis Tahun 2017*. Jawa Barat: Universitas Galuh.
- Buluamang, Yohanes Museng Ola. 2018. *Komunikasi Pemerintahan Antar Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018*. Propinsi NTT: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif-Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi – Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Eki dan Nazaki. 2015. *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN: Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Agenda Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015*. Provinsi Riau: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini. 1983. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mandafi. Andi Adityawarman. 2015. *Analisis Komunikasi Partisipatif Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Resapan Banjir Di Danau Tempe Kabupaten Wajo Kota Makassar*. Makassar: **Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimein. 2004. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnama, Dadang Hikmah. 2004. *Modul Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Robins, Garry. 2015. *Doing Social Network Research*. London: Sage Publications Ltd.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RINEKA CIPTA.
- Subyantoro, Arief & FX. Suwanto. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Warjio. 2016. *Politik Pembangunan Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Amandemen Ke-IV Tahun 2002.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 86, Tambahan Lembaran Negara No. 4113).
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Penyelenggaraan Musrebang Daerah.

Dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Pasar II Tahun 2019.

Data Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih Tahun 2018, Prabumulih Dalam Angka *In Figures*, 2018.